ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kab.Sumenep (Studi Fakir Miskin di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sumenep)

Handling People with Social Welfare Problems in Community Empowerment in Sumenep Regency (Study of the Poor in the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection, Sumenep Regency)

Oleh:
Risanti Nur Azizah[1)], HadiSoetarto[2)], Yayak Nurwahyudi[3)]

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura
E-mail: nurazizahrisanti@gmail.com hadi18soetarto@gmail.com -

Abstract

This research aims to find out how the Social Service Efforts in Overcoming the Poor in Sumenep Regency. From the results of the study it can be seen that the Social Service in Handling the Poor in Sumenep Regency is carrying out its duties properly. This can be seen from the implementation of the three indicators of Enabling where Enabling is the efforts made by the government, generally social services, by making the community have the potential to develop by holding sewing training and making bouquets in collaboration with Vionelita who is an expert in her field. Empowering, namely managing and utilizing the potential of the community by providing the necessary infrastructure and opening business opportunities that will make the community earn income. The efforts made at the Social Service are in the form of providing home industry facilities and skills houses in the hall of the District Social Service. Sumenep as well as providing sewing machine tools, and Protecting, which is protecting and propping up helpless people, this effort is in the form of providing Non-Cash Food Assistance (BPNT) groceries. The results of this study indicate that the efforts made by the Social Service in Overcoming the Poor in Sumenep Regency through community empowerment has been going well marked by a reduction in the poverty rate in 2022 which was originally at 20.51% has now fallen to 18.76%.
Keywords: Prevention, Poverty, Social Services.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Kabupaten Sumenep. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dalam Penanggulangan Fakir Miskin Di Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya tiga indikator dari *Enabling* yang dimana *Enabling*yaitu upaya yang dilakukan pemerintah umumnya dinas sosial dengan membuat masyarakat mempunyai potensi untuk dapat berkembang dengan berupa diadakannya pelatihan menjahitserta membuat buket dengan bekerjasama dengan Vionelita yang ahli dibidangnya. *Empowering* yaitu mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dan membuka peluang *(opportunities)* usaha yang akan membuat masyarakat mendapatkan penghasilan upaya yang dilakukan di Dinas Sosial ini berupa memberikan fasilitas home industri dan rumah keterampilan yang berada di aula Dinas Sosial Kabupaten Sumenep serta memberikan alat mesin jahit, dan *Protecting* yaitu melakukan perlindungan dan berpihak kepada masyarakat yang tidak berdaya, upaya tersebut berupa memberikan sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Kabupaten Sumenep melalui pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik ditandai dengan berkurangnya jumlah angka kemiskinan di tahun 2022 yang semula berada di angka 20,51% kini telah turun menjadi 18,76%.
Kata Kunci:*Penanggulangan, Fakir Miskin, Dinas Sosial*

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana ditegaskan dalam undang undang dasar tahun 1945 pasal 33, bahwa perekonomian ini disusun berdasarkan usaha secara bersama secara atas asas kekeluargaan, dan pasal34 mengenai fakir miskin dan anak terlantar ini dilindingi oleh negara. Hal ini dapat ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut model negara kesejahteraan. Kesejahteraan sosial sendiri sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan dengan baik tanpa adanya suatu permasalahan dalam kesejahteraan.(Suradi, 2007)

Kesejahteraan sosial sendiri ini memiliki arti bahwahak bagi setiap warga negara yang dimana kesejahteraan sosial merupakan suatu tujuan akhir dari suatu aspek pembangunan, dan ini dilakukan oleh negara secara bersama-sama dengan masyarakat dan kesejahteraan sosial juga merupakan suatu indikator kinerja pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan tidak dapat diwujudkan apabila jumlah penduduk fakir miskin, pengangguran, dan angka putus sekolah cukup tinggi, kesenjangan dan konflik sosial meluas dan meningkatnya perilaku anti sosial tidak dapat dikendalikan.

Pembangunan daerah pada hakikatnya dianjurkan tidak hanya memusatkan pada suatu pertumbuhan ekonomi saja namun harus mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomisehingga ini dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan perkapita akan meningkat sehingga cara otomatis akan meningkatkan kemakmuran rakyat. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.(Kasim, 2021)

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu dari faktor penyebab terjadinya pertambahan kebutuhan yang beragam, yang dimana seseorang tidak hanya cukup memiliki satu kebutuhan saja, akan tetapi memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan juga fasilitas pendidikan yang terpenuhi. Namun faktanya tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa kendala masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena faktor ekonomi yang minim.

Kesenjangan pembangunan di Sumenep disamping memicu tingginya kemiskinan juga menjadi sebab tingginya mobilisasi penduduk ke daerah kota-kota besar seperti Jakarta bahkan ke luar negeri untuk mencari peruntungan. Namun upaya yang tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian dan pengetahuan yang kurang maksimal dapat menjadikan nasib mereka

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

hanya sebagai pekerja atau buruh kasar. Mereka yang terlanjur datang ke kota dan tidak memiliki bekal yang cukup untuk mendapat pekerjaan yang layak, bekerja serabutan dan tidak tetap. Walaupun mereka hanya bekerja serabutan atau tidak tetap, tetapi mereka tetap bertahan untuk tinggal di suatu kota, karena yang mereka pikir lebih mudah mendapatkan uang di kota daripada di desa walau hanya bekerja secara tidak tetap.(Ikmal, 2019)

Dalam permasalahan suatu kesejahteraan sosial atau yang sering disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini, terdapat beberapa jenis masalah kesejahteraan sosial, diantaranya fakir miskin, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pemulung, lanjut usia yang terlantar, balita terlantar, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, bekas narapidana, pengguna napza, korban bencana alam, pekerja migran yang terlantar. Namun dari berbagai permasalahan yang ada disini peneliti fokus membahas fakir miskin.

Berbicara mengenai fakir miskin, angka kemiskinan di provinsi Jawa Timur saja masih sangat tinggi. Oleh karena itu persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di Jawa Timur pada maret tahun 2022 mencapai 1,721 juta jiwa untuk penduduk kota sementara untuk pedesaan 2,459 juta pada maret 2022. Namun dengan Kabupaten Sumenep berada pada angka kemiskinan 20,51%. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan untuk seluruh masyarakat itu sendiri belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari belum meratanya pembangunan di setiap daerah, terutama daerah-daerah pelosok atau pinggiran, yang sering luput dari perhatian Pemerintah.

Dalam permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Sumenep sendiri, penyandang masalah kesejahteraan sosial meningkat dengan adanya pasca covid-19. Berdasarkan catatan data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumenep tercatat mengalami peningkatan. Namun, ini disebabkan oleh covid-19 yang berdampak perekonomian masyarakat menjadi terpuruk.

Permasalahan yang muncul adalah setiap individu dalam sebuah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) cenderung memiliki lebih dari satu kategori jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini akan mempengaruhi dalam penentuan jenis bantuan yang layak diterima, dimana sebaiknya setiap individu hanya dikategorikan ke dalam satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS).

Di sisi lain, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kembali bertambah tampaknya juga berkaitan dengan terjadinya proses marginalisasi dan polarisasi antarwilayah yang makin lebar. Ketika sebuah keluarga mengalami kesulitan ekonomi, tidak jarang terjadi mereka kemudian sengaja atau tidak sengaja terpaksa menelantarkan anaknya, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak putus di tengah jalan karena keterbatasan ekonomi dan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

tekanan kemiskinan.

Pada saat membuat suatu kebijakan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan, salah satunya adalah kebijakan dari strategi yang dibuat untuk menyikapi permasalahan kelompok yang direncanakan dari pengaturan yang telah ditentukan. Untuk situasi ini, Bantuan Sosial Pemerintah Sumenep mengatur beberapa proyek, misalnya, program penguatan untuk keluarga tidak mampu, program bantuan dan pemulihan pemerintah. Program pembinaan untuk individu yang tidakmampu dan cedera. Program ini secara eksplisit untuk membantu pendanaan dan pembinaan masyarakat miskin dan jaringan fakir miskin. Sejauh manfaat program penguatan keluarga tidak mampu, program bantuan dan pemulihan pemerintah, program peningkatan anak-anak yang diabaikan, program pelatihan untuk individu cacat dan cedera yang diberikan kepada jaringan penerima dapat dianggap berhasil dan berdaya, misalnya program penguatan untuk keluarga kurang mampu, program administrasi dan program melalui pemberdayaan masyarakat.

Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui suatu pemberdayaan.

2. TINJAUANTEORITIS

Teori Administrasi Publik

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3) mengatakan bahwa admninistrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, menimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. (Kartikawati, 2020) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital. Hal ini dapat dilihat dari pendapat (Karl Polangidalam Keban, 2004:15) mengatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung dinamika administrasi publik.

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Sondang P, 2007).

Fakir Miskin

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penanganan Kemiskinan, yakni UU No. 13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Regulasi ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Namun setelah ditelaah dan dibaca secara lebih mendalam, ternyata di dalam UU ini tidak didapati secara khusus tentang kriteria

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

fakir miskin. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan.

Masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya.

Kesejahteraan Sosial

Menurut (Suharto, 2017), dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan sosial dari beberapa tokoh dapat disimpulkan konsep kesejahteraan sosial yaitu: a) Mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang b) Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial c) Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Sumardjo, 2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembanga kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

3. METODEPENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada "Penganggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kab. Sumenep" dengan melihat pendapat Menurut (Noor, 2011)terdapat tiga aspek yang dapat dikaji dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat yaitu : *Enabling*, *Empowering* dan *Protecting.*

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kota Sumenep. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Sumenep, karena Kabupaten Sumenep sendiri ini masih memiliki angka masalah kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Masalah kesejahteraan sosial pernah peneliti temui terdapat permasalahan yang terjadi.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer dengan melakukan pengamatan terhadap kejadian atau permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dekumenter. Sehingga peneliti dapat mengetahui permasalahan PMKS terhadap fakir miskin di Kabupaten Sumenep.

Subyek penelitian adalah sumber utama penelitian yang memiliki data penelitian. Adapun yang diambil sebagai subjek penelitian adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan suatu strategi dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. 1) Informan kunci adalah

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumenep, 2) Informan utama dalam penelitian ini merupakan Kasi Rehabilitasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumenep, 3) Informan pendukung adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumenep.

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dalam proses pengumpulan data.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu matode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga menarik kesimpulan.

4. HASILDANPEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sumenep merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sumenep mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, sereta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabitlitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

b. Hasil Penelitian

Keberadaan fakir miskin merupakan permasalahan klasik yang dihadapi setiap daerah bahkan negara.Kehadiran fakir miskin tersebut menuntut pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan terhadap fakir miskin.Penanggulangan fakir miskin tidak hanya dilakukan untuk mengurangi jumlah fakir miskin, tetapi juga dilakukan untuk memenuhi hak-hak fakir miskin.Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa produk hukum yang memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin dan sebagainya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sumenep merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas permasalahan sosial di Kabupaten Kota Sumenep. Eksistensi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sumenep dalam pelaksanaan otonomi daerah dituntut agar mampu memberikan sumbangsi nyata terhadap penyelesaian permasalahan sosial di Kabupaten Kota Sumenep termasuk mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin.Pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin merupakan hal penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengetahui peran Dinas Sosial

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sumenep dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kabupaten Kota Sumenep, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan bapak Fajarisman yang menjabat sebagai Kepala Bidang rehabilitasi sosial Kabupaten Kota Sumenep.

Penelitian ini difokuskan pada "Penganggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kab. Sumenep" dengan melihat pendapat Menurut (Noor,2011)terdapat tiga aspek yang dapat dikaji dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat yaitu *Enabling*, *Empowering*, dan *Protecting.*

Enabling

Enabling yaitu upaya yang dilakukan pemerintah umumnya dinas sosial dengan membuat masyarakat mempunyai potensi untuk dapat berkembang. Semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk mandiri dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Sehingga peneliti disini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengembangkan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.Tentunya dalam *enabling* yang dimana merupakan suatu cara membuat masyarakat mempunyai potensi untuk dapat berkembang, disini melakukan upaya dalam memberikan motivasi serta membangkitkan kesadaran. Hal ini disampaikan oleh informan utama ibu Sri Wayuni selaku kasi rehabilitasi bahwasanya :





Gambar 1. Kegiatan *enabling* Dinas Sosial

Sumber : Dokumentasi dari instansi

Empowering

Empowering, yaitu mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dan membuka peluang *(opportunities)* usaha yang akan membuat masyarakat mendapatkan penghasilan. Cara yang ditempuh yaitu dengan melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial.



Gambar 2. Berdasarkan Data BPS, Jumlah Penduduk Miskin di Sumenep Menurun

Sumber : (nolesa.com)

Protecting

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Protecting yaitu melakukan perlindungan dan berpihak kepada masyarakat yang tidak berdaya.Membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.



Gambar 3. Kadinsos P3A Sumenep dan Wakil Bupati Dewi Khalifah tengah menyalurkan bantuan secara simbolis kepada lansia dan penyandang disabilitas, Jumat (16/6/2023).

Sumber : (Joni Suhartono/Media Jatim)

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Sumenep berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan berupa pangan maupun non-pangan kepada fakir miskin. Pemberian bantuan dilakukan secara proporsional agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada fakir miskin. Bantuan berupa peralatan yang sesuai dentganketerampilan fakir miskin akan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup fakir miskin tersebut. Pada dasarnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sumenep berharap agar bantuan yang diberikan dapat menunjang kebutuhan dan perkembangan potensi diri fakir miskin.

Secara tidak langsung Dinas Sosial Kota Sumenep telah menanamkan sifat mandiri kepada masyarakat penyandang fakir miskin melalui pelatihan keterampilan. Keterampilan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk bekerja atau membuka lapangan pekerjaan sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah. Bahkan melalui keterampilan tersebut, besar kemungkinan jumlah fakir miskin kedepannya akan berukrang seperti yang terjadi pada tahun 2022 bahwa jumlah kemiskinan di Sumenep telah turun sebanyak 1,75% menjadi 18,76%. Dengan demikian hal ini dilakukan ddalam rangka untuk memberikan pengembangan diri bagi fakir miskin agar nantinya mendapatkan kehidupan yang layak sebagimana mestinya.

c. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneitian ini akan membahas mengenai Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sumenep dengan menggunakan tiga variabel pembnherdayaan masyarakat menurut (Noor,2011) diantaranya : *enabling* (faktor pemungkin dalam menciptakan suasana potensi masyarakat berkembang), *empowering* (memperkuat potensi yang dimiliki), dan *protecting* (melakukan perlindungan). Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan muncul selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, sehingga nantinya dapat dipahami oleh pembaca. Berikut ini analisa hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti berdasarkan tiga fokus penelitian mengenai Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut:

Enabling

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Enabling yaitu membuat masyarakat mempunyai potensi untuk dapat berkembang. Semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk mandiri dan bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan teori menurut (Noor,2011).*Enabling* ini dapat kita lihat dari beberapa kondisi masyarakat yang ada di Sumenep. Dalam *enabling* ini, yang dimana pemerintah daerah bergerak untuk dapat menciptakan suatu suasana potensi masyarakat untuk dapat berkembang guna meningkatkan kesadaran yang disertai dengan dorongan atau support dalam melakukan binaan atau pelatihan agar dapat membantu mensejahterakan dalam keberlangsungan hidup.

Dalam hal ini, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial pada fakir miskin disini pemerintah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan berupa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan tepat sasaran karena hal ini harus betul-betul dalam mempriotaskan program pada masyarakat miskin yang nantinya dapat hidup mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilokasi penelitian, bahwa dalam penanganan masyarakat fakir miskin ini telah dilakukan upaya mengajak masyarakat untuk membantu dalam masalah kesejahteraannya yang dimana Dinas Sosial disini berperan untuk mengajak masyarakat melalui gabungan dari perangkat daerah yang lain untuk melakukan kegiatan guna meningkatkan kesadaran dalam memperbaiki masalah ekonomi. Dinas bekerjasama dengan ahlinya di bidang yang dinas terapkan ya itu seperti pada pelatihan keterampilan dan menjahit. Dalam peserta menjahit disini merupakan peserta yang mengalami disabilitas. Kemarin ada 20peserta pelatihan dalam dan itu pesertanya mengalami disabilitas yang masih mampu bekerja.Namun disini pelatihannya ya ada pembuatan buket dan menjahit tidak ada pelatihan khusus untuk laki-laki dan perempuan.

Empowering

Menurut (Noor,2011)*empowering* mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dan membuka peluang*(opportunities)* usaha yang membuat masyarakat mendapatkan penghasilan. Cara yang ditempuh yaitu dengan melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial.

Dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat, dinas sosial disini menerapkan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat umumnya pada fakir miskin sebagai penyndang masalah kesejahteraan sosial.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sumardjo, (2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui proses empowering ini diperlukan sosialisasi dan pelatihan untuk tahap

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

penyadaran dimana masyarakat masih perlu dan harus diberikan motivasi untuk mengembangkan skill dan kemampuannya. Proses pemberdayaan masyarakat ini seharusnya menjadi proses memberdayakan untuk masyarakat yang kurang berdaya dalam keahlian, kreatifitas dan kemampuan dalam mengelola sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilokasi penelitian, upaya yag dilakukan dalam kegiatan berupaya dalam membantu masyarakat umumnya pada fakir miskin yang dimana fakir miskin belum memiliki pekerjaan hingga penghasilan yang berdampak pada presentase angka kemiskinan di Sumenep masih tinggi. Namun pada saat ini meski presentase masih tinggi dalam tingkatan provinsi jawa timur, kini Sumenep telah mengalami penurunan walau hanya 1,75% saja dari 20,51% menjadi 18,76% dengan dilakukannya beberapa upaya yang dapat membuat kemajuan.

Protecting

Menurut (Noor, 2011) *protecting* yaitu melakukan perlindungan dan berpihak kepada masyarakat yang tidak berdaya. Membuat regulasi yang jkelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Hal ini juga sependapat dengan (Suharto, 2005:58) yang menyatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusunya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan *(freedom)*, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka."

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilokasi penelitian, dalam membantu melindungi masyarakat Sumenep yang tergolong masyarakat lemah dan tidak berdaya dalam melakukan pelatihan dinas sosisal berinisiatif dalam melakukan penelusuran terutama pada daerah terpencil yang ada di kabupaten Sumenep guna membantu keberlangsungan hidup masyarakat Sumenep terutama pada masyarakat yang telah berumur atau sudah lanjut usia (lansia). Program bantuan ini bersifat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Program bantuan ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang dimana merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berupa layanan dasar, jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial berdasarakan peraturan yang ada (PerPres No.63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai).

5. PENUTUP

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan peneliti disini

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

mencakup tiga pokok upaya, ialah :1) *Enabling* yang dimana *enabling* disini menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat lebih berkembang dengan memberdayakan masyrakat fakir miskin yang tidak mempunyai penghasilan, 2) *Empowering* merupkan suatu tindakan dalam memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada masyarakat penyandang fakir miskin di Kabupaten Sumenep, 3) *Protecting*, selanjutnya protecting disini merupakan perlindungan pada masyarakat bawah dalam memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu.

DAFTARPUSTAKA

Ikmal, M. (2019). Kebijakan Pemenuhan Hak Sosial Dan Politik Kelompok Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, *3*(1), 327. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i1.1901

Kartikawati, D. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Bagi Pmks Yang Terdampak Psbb Di Gor Tanah Abang Jakarta Pusat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, *3*(3), 107–120. https://doi.org/10.54783/japp.v3i3.349

Kasim, fitri S. (2021). Determinan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah (Periode 2011- 2020). *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, *3*(1), 124–129. https://ojs.umada.ac.id/index.php/Tolis_Ilmiah/article/view/176

Rasyid, M., & Dompak, T. (2019). *Efektivitas Program Rehabilitasi Di Kota Batam*. 1–10.

Suradi. (2007). Pembangunan manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial. *Jurnal penelitian dan pengembangan kesjahteraan sosial*, *12*(3), 1–11.